



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## RISIKO PENGELOLAAN UTANG NEGARA

**Edmira Rivani**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[edmira.rivani@dpr.go.id](mailto:edmira.rivani@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Di tengah kondisi volatilitas pasar keuangan yang masih tinggi, pemerintah melaksanakan pengelolaan utang secara oportunistik, *prudent*, dan terukur dalam memenuhi pembiayaan utang tahun 2023. Pemerintah menjalankan pengelolaan utang dengan tetap memerhatikan fleksibilitas pembiayaan utang. Fleksibilitas pembiayaan utang dapat dioptimalkan untuk memperoleh biaya utang yang paling efisien dengan risiko yang terkendali. Fleksibilitas pembiayaan utang dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, yaitu fleksibilitas dari sisi penentuan waktu penerbitan yang tepat guna menghadapi volatilitas yang tinggi di pasar keuangan. *Kedua*, fleksibilitas dari sisi instrumen untuk memperoleh komposisi instrumen yang tepat dan memiliki biaya yang paling efisien.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.870,35 triliun per 31 Agustus 2023. Adapun rasio utang tersebut sebesar 37,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Utang pemerintah terbagi dalam surat berharga negara sebesar Rp6.995,18 triliun (88,88%) dan pinjaman sebesar Rp875,17 triliun (11,12%). Bila dirinci, utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara terbagi dalam surat berharga negara domestik dan surat berharga valas. Nilai utang dalam surat berharga negara domestik sebesar Rp5.663,94 triliun yang meliputi surat utang negara senilai Rp4.576,43 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp1.087,51 triliun. Nilai utang dalam bentuk surat berharga negara valas sebesar Rp1.331,24 triliun yang terbagi dalam surat utang negara Rp1.027,65 triliun dan surat berharga syariah negara Rp303,59 triliun. Sedangkan nilai utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp875,17 triliun yang terbagi dalam pinjaman dalam negara sebesar Rp25,11 triliun dan pinjaman luar negeri Rp850,05 triliun.

Rasio utang per Agustus 2023 sebesar 37,84% terhadap PDB, menurun dibandingkan akhir tahun 2022 dan berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih sejalan dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%. Adapun jumlah utang pemerintah, dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk di dalamnya, penarikan utang baru, jumlah jatuh tempo utang, jumlah bunga utang, hingga dinamika nilai tukar yang akan memengaruhi utang dengan bunga *floating*.

Ke depan, yang perlu diantisipasi adalah risiko terkait tingkat suku bunga tinggi untuk jangka Panjang (*higher for long*) yang akan memengaruhi kemampuan bayar, baik dari sisi swasta maupun pemerintah. Risiko lainnya yang bisa memberatkan pengelolaan utang dan defisit negara adalah tren pelambatan ekonomi negara mitra utama RI seperti AS dan China, yang berlangsung lebih lama dari perkiraan (*lower for longer*).

## Atensi DPR

Dengan kondisi utang saat ini pemerintah harus berupaya agar dapat mengembalikan posisi utang setidaknya sama seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Dalam hal ini pemerintah harus memerhatikan produktivitas dari penggunaan utang itu sendiri. Idealnya, saat pemerintah melakukan pinjaman atau pembiayaan melalui utang maka hasil yang diharapkan dari pembiayaan tersebut bisa dua atau tiga kali lebih besar dari nominal utang ataupun bunga utang yang akan ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi XI harus mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali. Dengan menyesuaikan strategi pembiayaan secara fleksibel serta meningkatkan kualitas belanja. Selain itu, ketergantungan pada pembiayaan utang juga ditekan dengan cara mengoptimalkan instrumen pembiayaan nonutang, seperti lewat Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dengan konsolidasi fiskal, diharapkan agregat rasio utang kita terhadap PDB terus menurun untuk jangka menengah dan panjang.

### Sumber

finance.detik.com, 25 September 2023;  
investor.id, 29 September 2023;  
Kompas, 29 September 2023;  
kumparan.com, 1 Oktober 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

### EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023